

Appendix 1

The Process of Deriving Macropropositions

The following Tables are the detail process of deriving macropropositions from the relevant paragraphs. They cover the comprehensive process of deriving macropropositions. There are five tables and these table represent five Indonesian government's economic development policies, namely: poverty alleviation, food security, infrastructure, investment and business, and energy.

Poverty Alleviation Policies

Paragraph	Basic Text	Sub-macropropositions	Primary Macroproposition
47	Keempat, memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.	SI Pemerintah memperkuat program-program pro-rakyat.	M1 Pemerintah memberikan dukungan dan melakukan langkah-langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan.
74	Bagi kaum pekerja, kita gulirkan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan sekaligus mendorong daerah-daerah untuk membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Regional. Sementara itu, kepada kalangan usaha kecil, mikro dan menengah, kita perluas program penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah kita rintis pada tahun-tahun sebelumnya.	T1 Pemerintah mendorong daerah-daerah untuk membayar upah pekerja sesuai UMR. T2 Pemerintah memperluas program penjaminan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk memberdayakan kalangan usaha mikro, kecil dan menengah.	
75	Sejalan dengan itu, dalam rangka mengembangkan kemandirian masyarakat, kita lanjutkan program PNPM Mandiri dengan mengalokasikan anggaran sebesar 13,1 triliun rupiah. Anggaran itu, kita rencanakan antara lain untuk: program PNPM	T3 Pemerintah mengembangkan kemandirian masyarakat pedesaan	

	perdesaan sebesar 9,6 triliun rupiah, dengan sasaran 5.020 kecamatan; program PNPM perkotaan sebesar 2 triliun rupiah, dengan sasaran 10.948 kelurahan; serta program PNPM daerah tertinggal dan khusus sebesar 42,3 miliar rupiah, dengan sasaran 85 kabupaten dan kota.	dan perkotaan melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri.	
14	Sementara itu, kenaikan harga komoditas dunia serta cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah, telah memberi tekanan pada laju inflasi di dalam negeri. Pada tahun 2010 lalu, laju inflasi mencapai 6.96 persen, sementara hingga bulan Juli tahun ini, inflasi kita—secara tahunan—mencapai 4.61 persen. Oleh karena itu, Pemerintah telah dan akan senantiasa menempatkan pengendalian harga-harga sebagai prioritas utama, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.	SII Pemerintah melanjutkan program-program pengurangan beban hidup masyarakat. T4 Pemerintah melakukan pengendalian harga-harga barang komoditas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. T5 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan subsidi dalam berbagai bentuk subsidi (energy dan non-energy). T6 Pemerintah melanjutkan program bantuan tunai bersyarat melalui PKH (Program Keluarga Harapan) untuk rumah tangga sangat miskin.	
69	Selain pengentasan kemiskinan, tugas penting negara lainnya adalah mengurangi beban hidup masyarakat, utamanya masyarakat berpendapatan rendah. Untuk itu Pemerintah tetap memberikan subsidi dalam berbagai bentuknya kepada mereka. Pada tahun 2012 mendatang, pemerintah masih tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi, dan sekaligus melakukan perbaikan dalam mekanisme penyalurannya agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.		
70	Dalam RAPBN 2012, anggaran subsidi direncanakan mencapai 208,9 triliun rupiah. Jumlah ini turun 28,3 triliun rupiah dari beban anggaran subsidi dalam APBN-P 2011 sebesar 237,2 triliun rupiah. Anggaran sebesar itu akan kita alokasikan untuk subsidi BBM 123,6 triliun rupiah; subsidi listrik 45 triliun rupiah; dan subsidi non-energi 40,3 triliun rupiah. Subsidi non-energi ini terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk,		

	subsidi benih, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik, subsidi bunga kredit program dan subsidi pajak.		
76	Selain itu, kita lanjutkan program bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 triliun rupiah untuk menjangkau sasaran sekitar 1,5 juta rumah tangga sangat miskin. Untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya, kita lanjutkan pemberian beras bagi rakyat miskin dan setengah miskin dengan mengalokasikan anggaran sebesar 15,6 triliun rupiah, kepada sekitar 17,5 juta rumah tangga sasaran. Semuanya itu, kita tujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat banyak, terutama bagi saudara-saudara kita yang berpendapatan rendah.		

Food Security Policies

Paragraph	Basic Text	Macro-components	Primary Macro-component
66	Di bidang perumahan, alokasi belanja modal kita rencanakan untuk menunjang pembangunan 175 rumah susun sederhana sewa dan unit hunian rumah susun beserta infrastrukturnya sebanyak 48 <i>twin blocks</i> . Anggaran itu, juga akan kita manfaatkan untuk membiayai pembangunan rumah murah sebanyak 62.500 unit. Untuk mendukung ketahanan pangan, kita akan membangun 9 waduk dan merehabilitasi 24	SIII Pemerintah mendorong peningkatan usaha sektor pertanian dan perikanan. T7 Pemerintah membangun dan merehabilitasi waduk dan embung untuk irigasi.	M2 Pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

	waduk. Kita juga akan menyelesaikan pembangunan 87 embung atau situ dan merehabilitasi 62 embung atau situ.	T8 Pemerintah menggulirkan program surplus beras 10 juta ton dalam 5 hingga 10 tahun kedepan.	
72	Selain berbagai bentuk subsidi, program-program peningkatan kesejahteraan rakyat juga tetap menjadi fokus utama dari RAPBN tahun yang akan datang. Oleh karena itu, dalam RAPBN 2012 ini kita berikan prioritas alokasi anggaran antara lain untuk ketahanan pangan sebesar 41,9 triliun rupiah. Kita, antara lain, gulirkan program surplus beras 10 juta ton dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Melalui berbagai program strategis itulah, kita berikan perhatian kepada segenap elemen masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, serta penghasilan dan kesejahteraan mereka. Perhatian kepada para petani, kita wujudkan antara lain melalui pemberian bantuan langsung pupuk sebesar 675 miliar rupiah atau setara 192,8 ribu ton. Selain itu, kita sediakan bantuan langsung bibit unggul sebesar 1,8 triliun rupiah, atau setara 185 ribu ton benih tanaman pangan.	T9 Pemerintah memberikan modal kerja kepada nelayan dan pengusaha perikanan untuk mengembangkan usaha perikanan.	
73	Perhatian kepada nelayan, kita lakukan melalui pengembangan sistem usaha budidaya ikan, dengan menyediakan modal kerja bagi sebanyak 3.340 kelompok nelayan; pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil untuk pembangunan kawasan minapolitan untuk 3.700 kelompok nelayan; serta pembangunan dan pembinaan pelabuhan perikanan pada 816 pelabuhan.		

Infrastructure Development Policies

Paragraph	Basic Text	Macro-components	Primary Macro-
-----------	------------	------------------	----------------

			component
60	<p>Sementara itu, prioritas alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, kita fokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terutama untuk mengurangi hambatan di bidang infrastruktur. Transportasi DKI Jakarta juga mendapat prioritas penanganan, untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Semuanya itu sangat penting untuk meningkatkan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>SIV Pemerintah akan meningkatkan belanja infrastruktur.</p> <p>T10 Pemerintah akan membangun jaringan rel kereta api baru.</p> <p>T11 Pemerintah akan mengembangkan, merehabilitasi dan membangun Bandar udara baru di berbagai pelosok.</p>	<p>M3 Pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai sarana pembangunan ekonomi.</p>
63	<p>Sejalan dengan arah kebijakan dan penentuan prioritas anggaran belanja kementerian dan lembaga, dalam RAPBN 2012, alokasi anggaran belanja modal kita rencanakan mencapai 168,1 triliun rupiah, naik 27,2 triliun rupiah atau 19,3 persen dari APBN-P 2011. Peningkatan anggaran belanja modal yang semakin tinggi, kita arahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur---termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi---sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung pengembangan dan peningkatan keterhubungan antar-wilayah.</p>	<p>T12 Pemerintah akan membangun jalan baru dan meningkatkan kapasitas jalan serta melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan.</p> <p>T13 Pemerintah akan membangun jembatan-jembatan baru dan memelihara serta memperbaiki jembatan-jembatan di seluruh pelosok tanah air.</p>	
44	<p>Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat.</p>		
64	<p>Untuk meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, pada pembangunan di bidang perhubungan, belanja modal kita rencanakan antara lain untuk membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer serta mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru di berbagai tempat di seluruh tanah air. Kita ingin menyeimbangkan</p>		

	pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.		
65	Untuk mengatasi sumbatan infrastruktur dan meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, akan kita gunakan anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km. Disamping itu kita juga melakukan preservasi yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 kilometer; membangun jembatan baru sepanjang 7.682 meter dan memelihara jembatan sepanjang 217.076 meter diseluruh pelosok tanah air.		
66	Di bidang perumahan, alokasi belanja modal kita rencanakan untuk menunjang pembangunan 175 rumah susun sederhana sewa dan unit hunian rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 48 <i>twin blocks</i> . Anggaran itu, juga akan kita manfaatkan untuk membiayai pembangunan rumah murah sebanyak 62.500 unit. Untuk mendukung ketahanan pangan, kita akan membangun 9 waduk dan merehabilitasi 24 waduk. Kita juga akan menyelesaikan pembangunan 87 embung atau situ dan merehabilitasi 62 embung atau situ.		

Investments and Business Policies

Paragraph	Basic Text	Macro-components	Primary Macro-component
18	Untuk mengantisipasi terjadinya pembalikan arus modal masuk dan dampak buruk penurunan ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah pengamanan: kita lakukan kerjasama dengan Bank	SV Pemerintah melakukan antisipasi pembalikan arus modal masuk dan dampak buruk penurunan ekonomi global.	M4 Pemerintah melakukan langkah-langkah pengembangan dan pengamanan iklim

	Indonesia untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN), pembelian kembali SBN dengan dana APBN, pembentukan dana stabilisasi obligasi, dan penyiapan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung stabilisasi pasar SBN domestik. Langkah antisipasi ini kita lakukan untuk memberikan sinyal positif bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini aman dan baik. Langkah-langkah ini, <i>insya</i> Allah dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan bagi para pelaku ekonomi.	T13 Pemerintah melakukan kerja sama dengan BI. T15 Pemerintah membentuk dana obligasi. T16 Pemerintah menyiapkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).	investasi dan usaha.
61	Selain ketujuh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran di atas 20 triliun rupiah, juga terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas 10 triliun rupiah. Beberapa kementerian dan lembaga itu adalah: Kementerian Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar 17,8 triliun rupiah, terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu produk pertanian dalam arti luas; Kementerian Keuangan 17,8 triliun rupiah, terutama untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan; Kementerian Dalam Negeri 17,1 triliun rupiah, terutama untuk program peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 15,6 triliun rupiah, untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi secara optimal.	T17 Pemerintah memperkuat stabilitas system keuangan.	
22	Berkaitan dengan itu, kita perlu menempuh langkah-langkah terobosan. Sejak Desember tahun lalu, saya telah mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan memperluas perekonomian nasional. Upaya ke arah percepatan dan	SVI Pemerintah melakukan transformasi ekonomi nasional dengan merealisasikan program MP3EI. T18 Pemerintah mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia	

	perluasan pembangunan ekonomi itu, kemudian kita tuangkan ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI.	sebagai penggerak laju pertumbuhan ekonomi, pembukaan jalur investasi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.	
23	Kebijakan baru ini adalah langkah terobosan strategis, untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional, yang kita jalankan selama ini. Dalam rancang bangun MP3EI itu kita gunakan tiga strategi besar.		
24	Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku;		
27	Pengembangan keenam koridor ekonomi itu kita harapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah.		
21	Saat ini kita tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Kita patut bersyukur, pertumbuhan ekonomi kita hingga saat ini terus meningkat. Momentum pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat itu telah makin memperluas lapangan kerja. Dengan perluasan lapangan kerja, tingkat pengangguran terbuka dapat kita turunkan. Pada awal tahun 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5 persen. Upaya ini harus terus kita tingkatkan agar tahun depan, jumlah pengangguran terbuka dapat kita turunkan lagi hingga menjadi 6,4-6,6		

	persen, dan jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi sekitar 10,5-11,5 persen.	
--	--	--

Energy and Mineral Resources Utilization Policies

Paragraph	Basic Text	Macro-components	Primary Macro-component
61	<p>Selain ketujuh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran di atas 20 triliun rupiah, juga terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas 10 triliun rupiah. Beberapa kementerian dan lembaga itu adalah: Kementerian Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar 17,8 triliun rupiah, terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu produk pertanian dalam arti luas; Kementerian Keuangan 17,8 triliun rupiah, terutama untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan; Kementerian Dalam Negeri 17,1 triliun rupiah, terutama untuk program peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 15,6 triliun rupiah, untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi secara optimal.</p>	<p>SVII Pemerintah memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan energy di Indonesia.</p> <p>T19 Pemerintah melanjutkan program konversi minyak ke gas.</p> <p>T20 Pemerintah melakukan peningkatan pemanfaatan energi alternative seperti BBN dan BBG.</p>	M5 Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi.
71	<p>Pemerintah menyadari bahwa subsidi yang sebetulnya merupakan hak masyarakat ekonomi lemah ke bawah, penyalurannya masih banyak yang kurang tepat sasaran, sehingga juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang telah dilakukan pada tahun 2011 tetap dilanjutkan dalam tahun 2012. Volume BBM bersubsidi, kita kendalikan antara lain</p>		

<p>melalui: optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg; peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Bahan Bakar Gas (BBG); serta pembatasan volume konsumsi secara bertahap.</p>		
--	--	--

